

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Ali (2015), *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, Jakarta:Kencana
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusuma P.H.N.M dan Bimasakti.A.M (2020). *Panduan Beracara si Pengadilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*, Jakarta: Kencana
- Putriyanti Ayu (2018), *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Semarang: Yoga Pertama
- R. Subekti (1998), *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Riawan W. (2009), *Peradilan Tata Usaha Negara PTUN, mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sarwono (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak Enrico (2018), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Penantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Wiyono (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negar*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

- Afriza, R., Indra, M., & Artina, D. (2016). *Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa Dan Sanksi Administratif Di Pengadilan Tata USAha Negara* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Akhir, R. (2015). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata USAha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 531*.

k/tun/2013) The Verdict Execution Of The Administrative Court And Binding (A Case Study Of Kasasi Decision Number: 531. k/tun/2013). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209982.

Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.

Butarbutar, A. S., & Butarbutar, E. N. (2024). Penegakan Hukum Yang Berwawasan Kebangsaan, Dalam Negara Hukum Republik Indonesia: Law Enforcement With A National Insight, In The Legal State Of The Republic Of Indonesia. *Jurnal Hukum Justice*, 28-37.

Heriyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 141-156.

Jiwantara, F. A., & Wibowo, G. D. H. KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE.

Lahopang, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(3).

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

Nugroho, M. A. A. (2020). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(1), 22-38.

Pattipawae, D. R., Piris, H. J., & Lainsamputty, N. (2023). PENYULUHAN EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 6851-6857.

Purba, C. R. A., & Andrianto, W. (2023). Implementasi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan PTUN. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 149-160.

Rahman, C. T. N. (2023). Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian. *Novum: Jurnal Hukum*, 35-48.

Ridwan, H. R. (2002). Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(20), 68-80.

Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Heriyanto, B. (2023). KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 121-129.

Suyanto, W. F. P. (2022). Efektivitas eksekusi upaya paksa. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 34-47.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi.

Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor

Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.SMG

01/KM.TUN/HK.27/Juklak/VII/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Wawancara

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke

Zulfahanum, S.H., M.H., 18 November 2024